

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah tak henti hentinya kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan Ridhonya jumlah Rencana Strategi Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 di susun sebagai arah kebijakan dan starategi dalam rangka menyusun program dan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumenep terhadap pembangunan yang pada giliran nya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal – hal yang dituangkan dalam rencana strategi ini meliputi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang ingin di capai dalam kurun waktu lima Tahun yang tercermin dalam program - program pokok rencana kegiatan kesejahteraan rakyat dalam mewujudkan tertib administrasi sesuai dengan aspirasi masyarakat. Demikian semoga dengan disusunnya rencana Strategi ini dapat bermanfaat guna menunjang kelancaran proses pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat khususnya Kabupaten Sumenep.

Sumenep,
**KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SUMENEP**

Ir. ERI SUSANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680225 199403 1 007

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 LANDAASAN HUKUM	I-3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SUMENEP	
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	II-1
2.2 SUMBER DAYA SKPD DINAS PU SUMBER DAYA AIR.....	II-4
2.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	II-9
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN.....	II-15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI SKPD	III-1
3.2 TELAAH VISI MISI KEPALA DAERAH	III-2
3.3 TELAAH K/L RENSTRA PROV. JATIM	III-7
3.4 FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG	III-10
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 TUJUAN DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KAB. SUMENEP ..	IV-1
4.2 SASARAN DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KAB. SUMENEP	IV-2
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS	IV-4
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 STRATEGI.....	V-1
5.2 ARAH KEBIJAKAN	V-2
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
BAB VIII PENUTUP	

LAMPIRAN

Daftar Tabel

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.4 LATAR BELAKANG	I-1
1.5 LANDAASAN HUKUM	I-3
1.6 MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SUMENEP	
2.5TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	II-1
2.6SUMBER DAYA SKPD DINAS PU SUMBER DAYA AIR.....	II-4
2.7AKUNTABILITAS KEUANGAN	II-9
2.8TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN.....	II-15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.6 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKA TUPOKSI SKPD	III-1
3.7TELAAH VISI MISI KEPALA DAERAH.....	III-2
3.8TELAAH K/L RENSTRA PROV. JATIM	III-7
3.9FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG	III-10
3.10 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.4 TUJUAN DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KAB. SUMENEP ..	IV-1
4.5 SASARAN DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KAB. SUMENEP	IV-2
4.6 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS	IV-4
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 STRATEGI.....	V-1
5.2 ARAH KEBIJAKAN	V-2
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAA INDIKATIF	
BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
BAB VIII PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumber daya alam lainnya dan merupakan sumber daya yang terbaru, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat. Tak seorangpun yang menyangkal bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh kehidupan, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, yang tidak dapat digantikan. Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang.

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

Pengelolaan sumber daya air tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Dalam hal ini pembangunan ketersediaan air baku berskala kecil akan lebih diutamakan agar rakyat kecil lebih dapat menikmatinya. Prioritas utama pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis.

Untuk menyesuaikan perubahan paradigma dan mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan sumber daya air, menempatkan air dalam dimensi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras, mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, mengakomodasi

tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan perhatian yang lebih baik terhadap hak dasar atas air bagi seluruh rakyat, dan mewujudkan mekanisme dan proses perumusan kebijakan dan rencana pengelolaan sumber daya air yang lebih demokratis.

Dengan berlakunya kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan akan berdampak pada peninjauan kembali kebijakan-kebijakan yang terkait dengan konservasi sumber daya air. Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1974, seluruh jajaran pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep diharapkan dapat mensukseskan program Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air.

Sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumenep No. 16 Tahun 2008 tentang “ Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah, Kedudukan tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi ”, maka fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep adalah unsur pelaksana otonomi daerah bidang pekerjaan umum ` yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.

Mengingat kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air, maka pembangunan dan pengelolaan sumber daya air perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang realistis, dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan yang dihadapi dan mengacu pada arah kebijakan nasional tentang pembangunan dan pengelolaan sumber daya air.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025”. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep perlu menyusun Rencana Strategis dalam rangka pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep untuk Tahun 2016-2021 diharapkan dapat diketahui tahapan pencapaian hasil secara obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing program dan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air di Kabupaten Sumenep.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya. Adapun peraturan perundangan yang terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2011 tentang Irigasi

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 sebagai landasan untuk melaksanakan capaian tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, dan program yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep di bidang Pengairan selama lima (5) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah :

- Memberikan gambaran dan jabaran informasi atas regulasi, kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan rencana kerja program pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep untuk masa 6 (enam) Tahun mendatang.
- Memberikan gambaran dan jabaran informasi rencana strategis pembangunan dan pengelolaan sumber daya air, kondisi dan rencana capaian pelayanan serta permasalahan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Sumenep.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN SUMENEP

Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep memuat tentang informasi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep juga memuat tentang capaian-capaian penting yang telah dihasilkan serta mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi serta solusinya.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SUMENEP

2.1.1 Tugas

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.

2.1.2 Fungsi

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut adalah :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pekerjaan umum Sumber Daya Air.
2. Perumusan kebijakan dalam kegiatan pengembangan dan konservasi sumber daya air.
3. Perumusan kebijakan dalam kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air
4. Perumusan kebijakan dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
5. Perumusan kebijakan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air.
6. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang Sumber Daya Air.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 16 Tahun 2008 terdiri dari unsur-unsur :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat terbagi menjadi :

- Subbag. Program Perencanaan Dan Keuangan
- Subbag. Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air Dan Bina Manfaat mempunyai tugas ;

- a. Penyiapan program dan rencana kerja kegiatan tahunan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) rencana strategis (RESTR) dinas.
- b. Penyusunan data base sumber daya air dan pengolahan data hidrologi serta kualitas air.
- c. Perencanaan, pengembangan dan penyediaan air baku serta konservasi sumber daya air
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin mendirikan serta merubah atau membongkar bangunan diatas atau didalam dan melintasi perairan umum serta pemanfaatan tanah stren
- e. Penyusunan pedoman, pembinaan dan pelaksanaan penyuluhan pelatihan hippa/ghippa/ihippa/pokmas embung
- f. Penanganan kerusakan bangunan air yang tidak terencanakan pada tahun anggaran berjalan :

Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air Dan Bina Manfaat terbagi menjadi :

- Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Air
- Seksi Bina Manfaat

4. Bidang Sungai, Waduk dan Pantai

Bidang Sungai, Waduk dan Panta mempunyai tugas melaksanakan urusan konservasi dan pengendalian sumber air serta pengamanan dan

penanggulangan akibat bencana alam. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sungai, Waduk dan Pantai terbagi menjadi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksana tugas penanganan sungai, waduk dan abrasi pantai
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penanganan sungai, waduk dan abrasi pantai
- c. Penyiapan penyelenggaraan pembinaan pengelolaan dan pendayagunaan sungai, waduk dan abrasi pantai
- d. Penyiapan pedoman, pengendalian, perencanaan dan pengawasan teknis kegiatan penanganan sungai, waduk dan abrasi pantai
- e. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pada sungai, waduk dan abrasi pantai
- f. Penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan sungai, waduk dan abrasi pantai
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Sungai, Waduk dan Pantai terbagi menjadi :

- Seksi Pembangunan dan Pengembangan Irigasi dan Air Tanah
- Seksi Pembangunan dan Pengembangan Air

5. Bidang Irigasi

Bidang irigasi mempunyai tugas :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang irigasi air permukaan, air tanah serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- b. Penyusunan pedoman, pengelolaan dan pelaksanaan irigasi
- c. Pelaksanaan verifikasi teknis dan pengendalian mutu konstruksi kegiatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi dan perbaikan dibidang keirigasian;
- d. Penyiapan pedoman, pengendalian, perencanaan dan pengawasan teknis kegiatan irigasi
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan irigasi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Irigasi terbagi menjadi :

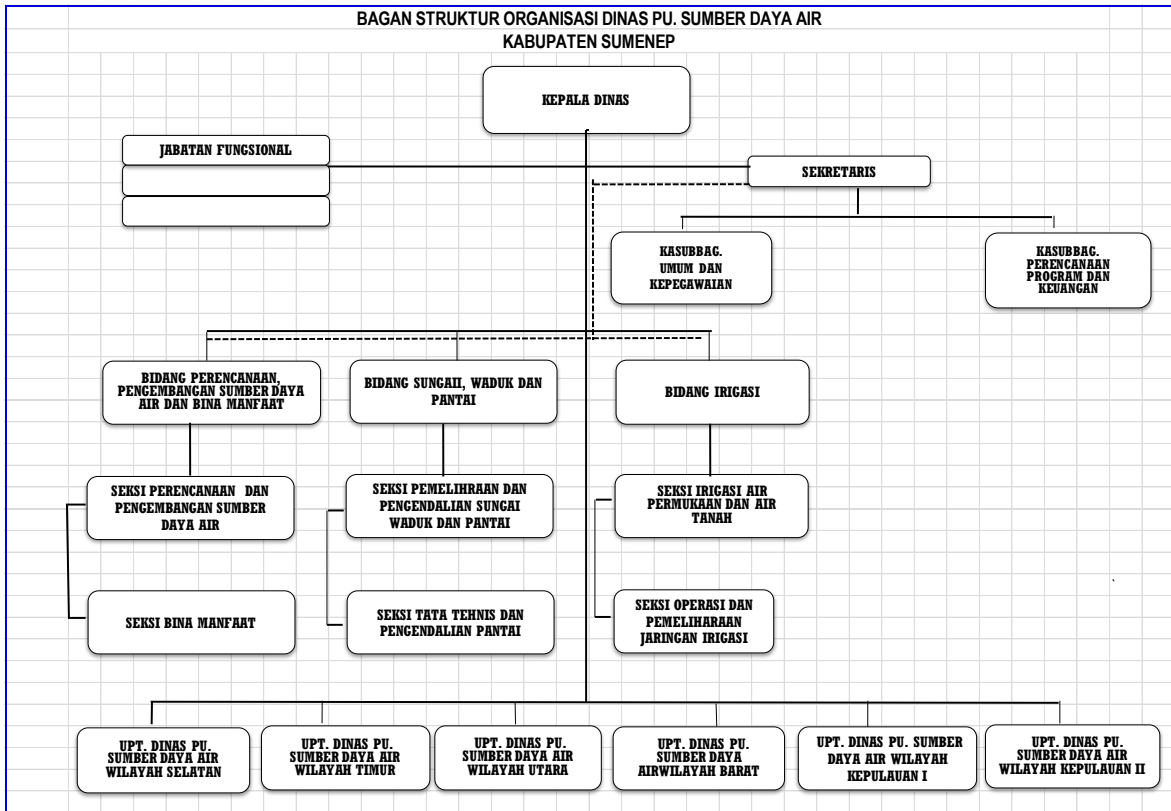
- Seksi Seksi Irigasi Air Permukaan dan Air Tanah
- Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep juga memiliki oleh 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki wilayah kerja sesuai dengan Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2006 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan dengan rincian sebagaimana berikut :

1. UPT Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kecamatan Wilayah Timur, wilayah kerjanya meliputi 6 (enam) Kecamatan yaitu Kota Sumenep, Kalianget, Manding, Gapura, Dungkek dan Batuan.
2. UPT Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kecamatan Wilayah Barat, wilayah kerjanya meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Guluk-guluk, Ganding dan Pragaan.
3. UPT Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kecamatan Wilayah Utara, wilayah kerjanya meliputi 6 (enam) Kecamatan yaitu Rubaru, Ambunten, Pasongsongan, Dasuk, Batang-batang dan Batuputih.
4. UPT Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kecamatan Wilayah Selatan, wilayah kerjanya meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Bluto, Saronggi dan Lenteng
5. UPT Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kecamatan Wilayah Kepulauan 1, wilayah kerjanya meliputi 6 (enam) Kecamatan yaitu Talango, Giligenting, Gayam, Nonggunong, Ra'as dan Masalembu.
6. UPT Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kecamatan Wilayah Kepulauan 2, wilayah kerjanya meliputi 3 (tiga) yaitu Kecamatan Arjasa, Sapeken dan Kangayan.

Gambar 2-1 Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab.Sumenep



2.2 SUMBER DAYA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SUMENEP

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak organisasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun Jumlah Karyawan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep terdiri dari pejabat struktural dan staf berjumlah 111 Orang,. Gambaran singkat tentang pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2-1 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	PASCASARJANA (S2)	4 Orang
2	SARJANA (S1)	35 Orang

3	SARJANA MUDA (D3)	2 Orang
4	SLTA / SMEA / MA	64 Orang
5	SLTP	2 Orang
6	SD	4 Orang
Jumlah		111 Orang

Tabel 2-2 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Umur

No.	Range umur	Jumlah
1	>55 Tahun	30 Orang
2	50 - 55 Tahun	22 Orang
3	40 - 49 Tahun	44 Orang
4	30 - 39 Tahun	15 Orang
5	<30 Tahun	- Orang
Jumlah		111 Orang

Tabel 2-3 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	101 Orang
2	Perempuan	8 Orang
Jumlah		111 Orang

Tabel 2-4 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	7 Orang
2	Golongan III	41 Orang
3	Golongan II	58 Orang
4	Golongan I	5 Orang
5	Pegawai Harian Lepas (PHL)	- Orang
Jumlah		111 Orang

Tabel 2-5 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Kepangkatan

No.	Pangkat	Jumlah
-----	---------	--------

1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 Orang
3	Pembina (IV/a)	5 Orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	12 Orang
5	Penata (III/c)	7 Orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	7 Orang
7	Penata Muda (IIIa)	15 Orang
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	5 Orang
9	Pengatur (II/c)	27 Orang
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	13 Orang
11	Pengatur Muda (II/a)	13 Orang
12	Juru Tingkat I (I/d)	- Orang
13	Juru (I/c)	4 Orang
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	1 Orang
15	Juru Muda (I/a)	- Orang
16	Pegawai Harian Lepas (PHL)	- Orang
Jumlah		111 Orang

2.2.2 Aset Barang

Selain Sumber Daya Manusia, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep juga memiliki aset / modal berupa :

- Tanah/Bangunan
- Peralatan dan Alat kantor

Tabel 2-6 Aset Tanah dan Bangunan

NO	RUMAH / KANTOR DINAS	JUMLAH	ALAMAT
1	Rumah Kepala Dinas	-	
2	Gedung Kantor	1	Desa Pabian
3	Rumah Jaga Bendung :		
	- Bendung Parsanga	1	Desa Parsanga Kec. Kota Sumenep
	- Bendung Kebonagung	1	Desa Kebonagung Kec. Kota Sumenep
	- Bendung Tambakagung		Desa Tambak Agung

			Tengah Kec. Ambunten
4	Kantor UPT :		
	- UPT Sumber Daya Air Wil. Utara	1	Desa Tambak Agung Tengah Kec. Ambunten
	- UPT Sumber Daya Air Wil. Selatan	1	Desa Banaresep Timur Kec. Lenteng
	- UPT Sumber Daya Air Wil. Barat	1	Desa Guluk-Guluk Kec. Lenteng
	- UPT Sumber Daya Air Wil. Timur	1	Desa Kebonagung Kec. Kota Sumenep
	- UPT Sumber Daya Air Wil. Kep. II	1	Kec. Arjasa

Tabel 2-7 Peralatan dan Alat kantor

NO	JENIS BARANG	JML. BRG	KONDISI BARANG		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
I	PERALATAN DAN MESIN				
	Alat-Alat Berat				
1	Crawler Exavator	1	-	-	1
2	Hand Stamper	2	-	2	-
3	Dump Truck	1	1	-	-
4	Truck Crane	1	1	-	-
5	Mesin penggerak	1	1	-	-
6	Mesin penggerak dan pompa turbin	31	31	-	-
7	Mesin pompa	6	6	-	-
8	Mesin pompa portable centri fugas	2	2	-	-
9	Mesin Pompa Turbin	6	6	-	-
NO	JENIS BARANG	JML. BRG	KONDISI BARANG		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
II	ALAT-ALAT ANGKUTAN				
1	Mobil Dinas	7	5	1	1
2	Sepeda Motor	43	37	4	2

3	Sepeda Motor Roda 3	3	3	-	-
III	ALAT BENGKEL DAN UKUR				
1	Bak Ukur	1	1	-	-
2	Waterpass	1	1	-	-
3	Penakar curah hujan manual	8	8	-	-
4	Penakar curah hujan Otomatis	1	1	-	-
5	Alat ukur debit (Current meter)	1	1	-	-
IV	ALAT - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1	AC	12	9	-	3
2	Brankas	2	1	-	1
3	Komputer / PC	40	24	3	13
4	Filing kabinet	31	28	-	3
5	GPS	3	2	-	1
6	Hammer Test	1	1	-	-
7	Hecmachine besar	4	4	-	-
8	Hypergain Antena	1	1	-	-
9	Kursi	41	41	-	-
10	Kursi eselon II	2	2	-	-
11	Kursi eselon IV	11	11	-	-
12	Kursi Kerja Eselon	16	16	-	-
13	Kursi Kerja Staf	85	85	-	-
14	Kursi lipat	24	19	5	-
15	Kursi putar	15	9	-	6
16	Kursi rapat	150	150	-	-
17	Kursi tangan	15	15	-	-
18	LCD	2	2	-	-
19	Lemari Arsip Compacto	2	2	-	-
20	Lemari arsip kayu	6	6	-	-
21	Lemari besi metal	20	15	-	5
22	Lemari kayu	10	10	-	-
23	Meja	6	6	-	-
24	Meja biro	1	1	-	-

25	Meja Gambar	5	5	-	-
26	Meja Kerja Eselon	15	15	-	-
27	Meja Kerja Staf	7	6	-	1
28	Meja ketik	1	1	-	-
29	Meja komputer	13	8	-	5
30	Meja kursi kerja	10	10	-	-
31	Meja rapat	1	1	-	-
NO	JENIS BARANG	JML. BRG	KONDISI BARANG		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
32	Meja Tamu	2	-	2	-
33	Meja tulis	26	23	-	3
34	Mesin Faximile	1	1	-	-
35	Mesin Hitung	10	-	1	9
36	Mesin ketik	4	2	-	2
37	Mesin pemotong rumput	22	15	-	7
38	Mesin penghancur kertas	5	3	-	2
39	Notebook	17	12	-	5
40	Papan tulis	1	1	-	-
41	Printer / A3	3	-	-	3
42	Printer	29	11	-	18
43	Rak besi / metal	2	-	-	2
44	Scanner	1	1	-	-
45	Sofa	1	1	-	-
46	Stavolt	2	-	-	2
47	Televisi	2	2	-	-
48	UPS	10	5	-	5
49	White board elektrik	1	-	-	1
50	Mesin conor	1	1	-	-
III	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI				
1	Faximile	1	1	-	-
2	Kamera Digital	8	3	-	5

3	Scanner	1	1	-	-
4	Sound System	1	1	-	-
5	Wareless	6	6	-	-

2.2.3 Aset Barang

Berikut ini adalah potensi dan aset sumber daya air yang terdapat di Kabupaten Sumenep :

- Panjang Sungai Wilayah Daratan : 429,90 km
- Panjang Sungai Wilayah Kepulauan : 154,95 km
- Jumlah Bendung : 27 bh
- Jumlah Embung/Long Storage : 20 bh
- Panjang Saluran Primer : 12.565 m
- Panjang Saluran Sekunder : 50.442 m
- Panjang Saluran Tersier : 348.535 m

- Luas Areal Irigasi
 - Teknis : 5.826 Ha
 - Setengah Teknis : 930 Ha
 - Non Teknis : 1.560 Ha
 - Sawah Non PU./ JIAT : 2.201 Ha
 - Sawah Tadah Hujan : 9.195,8 Ha
- Jumlah Titik Sumber Air : 269 Bh
- Jumlah Titik Sumur Bor : 138 Bh
- Jumlah Penakar Hujan : 24 Bh

2.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SUMENEP

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pada periode RPJMD sebelumnya yaitu pada tahun 2011-2015, kinerja pelayanan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1. Indikator Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,57%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja

tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 mengalami peningkatan capaian kinerja. Namun, capaian kinerja dari tahun ke tahun telah mencapai realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Indikator Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,86%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 mengalami peningkatan capaian kinerja.

3. Indikator Luas Wilayah Kebanjiran

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 64,71%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 mengalami penurunan capaian kinerja. Target indikator ini belum bisa tercapai hal ini dikarenakan kendala faktor alam dan manusia berupa banyaknya kejadian banjir di beberapa sungai, yang menyebabkan kerusakan alur sungai dan penurunan fungsi tanggul akibat banjir, sedimentasi sungai yang cukup tinggi maupun faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya pada lokasi yang berbeda.

4. Indikator Perlindungan Terhadap Abrasi Pantai

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 67,08%. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 indikator ini terus mengalami penurunan capaian kinerja. Hal ini diakibatkan besarnya banyaknya lokasi pantai yang membutuhkan bangunan pelindung akibat hantaman ombak yang terus menerus yang terjadi sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan/degradasi pantai.

5. Indikator Tingkat Penyediaan Air Baku Dan Irigasi Pada Sawah Tadah Hujan

a. Embung

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan terbangunnya 1 (satu) embung baru di Desa Poja Kecamatan Gapura maka jumlah embung yang menjadi kewenangan Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep pada akhir Tahun 2015 menjadi berjumlah 24 (dua puluh empat) lokasi.

b. Air tanah dalam

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2015 menghasilkan capaian kinerja sebesar 0% dikarenakan tidak terdapat kegiatan pengeboran sumur baru, pembangunan rumah pompa baru maupun pengadaan mesin. Adapun kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2015 adalah Pemeliharaan berkala Rumah Pompa & JIAT di 5 (lima) lokasi serta Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 10 (sepuluh) lokasi.

Pencapaian kinerja pelayanan terhadap target renstra pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep untuk periode sebelumnya (2011-2015) dapat dilihat pada **Tabel T.IV-C.2** Lampiran Renstra ini.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pada periode RPJMD sebelumnya yaitu pada tahun 2011-2015, jumlah pendanaan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

- **Target pendapatan daerah** mengalami kenaikan yang signifikan dari target Rp. 88.000.0000,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 202.376.655,- hingga tahun 2015.
- **Realisasi pendapatan daerah** tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun awal 2011, dan untuk periode tahun 2012-2014 mampu memenuhi target 100%. Pada tahun 2015 kembali tidak mencapai target yang ditentukan dikarenakan alat berat mengalami kerusakan.

Adapun untuk Belanja Daerah khususnya Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

- **Belanja Tidak Langsung** dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar Rp. 5.080.128.548,- menjadi Rp. 6.081.122.757,- pada tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat berupa kenaikan gaji untuk PNS.

Selain itu, adanya kenaikan pangkat dan jabatan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep juga turut mempengaruhi kenaikan belanja tidak langsung.

- **Belanja Langsung** dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar Rp. 20.737.368.248,- menjadi Rp. 42.365.298.536,- pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan karena kemampuan finansial Kabupaten Sumenep juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun serta ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 dalam rangka peningkatan pelayanan irigasi di Kabupaten Sumenep.

Pencapaian jumlah anggaran dan realisasi pendanaan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep untuk periode sebelumnya (2011-2015) dapat dilihat pada **Tabel T.IV-C.3**

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SUMENEP

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan disamping faktor kualitas lingkungan hidup dan budaya masyarakat. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi mikro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Kabupaten Sumenep dapat membaik.

Secara garis besar permasalahan beserta solusinya dalam rangka pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Aspek Irigasi

Tantangan :

- a. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi jaringan beserta Daerah Irigasi agar kondisi jaringan irigasi tersebut tetap dalam kondisi baik, bahkan menambah rasio sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yakni panjang saluran irigasi primer 12,565 km, sekunder 50,442 km dan saluran pembuang 45,080 km memerlukan komponen pemeliharaan dan perbaikan yang cukup besar
- b. Pola pemakaian air irigasi di tingkat petani masih cukup tinggi, banyak terjadi penyimpangan dalam rencana tata tanam dan pola alokasi air pengambilan air yang telah disepakati serta pencurian air secara langsung dengan membobol saluran yang melintasi sawah di banyak titik.
- c. Pola iklim Kabupaten Sumenep yang cenderung kurang membuat sulit untuk mencapai intensitas tanam padi sebesar 200%
- d. Perkembangan daerah kota yang sangat pesat yang awalnya berupa areal persawahan banyak beralih fungsi menjadi areal pemukiman. Hal tersebut diperparah dengan pembangunan perumahan tanpa melalui prosedur izin yang benar dengan jalan membangaun terlebih dahulu baru ijin kemudian diurus sehingga mempersulit proses

verifikasi

Peluang :

- a. Melaksanakan pola operasi dan pemeliharaan yang efisien dan secara rutin dengan mengacu kepada standar pola Operasi dan Pemeliharaan untuk mempertahankan kinerja jaringan irigasi. Metode pembiayaan menggunakan sistem prioritas dengan mengedepankan azas manfaat
- b. Penyuluhan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) mengenai efisiensi pemakaian air irigasi.
- c. Melaksanakan studi untuk mengoptimalkan jaringan irigasi yang sudah ada dan mengaktifkan kembali tampungan-tampungan yang sudah tidak berfungsi.
- d. Mengendalikan alih fungsi lahan untuk mencegah penurunan fungsi resapan air dari pembangunan permukiman, perkotaan dan industry melalui pengaturan kembali regulasi tentang penataan ruang areal perkotaan/pedesaan dengan berkoordinasi dengan SKPD maupun stakeholders terkait

2. Aspek Air Baku dan Konservasi Sumber Daya Air

Tantangan :

- a. Sejalan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, jumlah kebutuhan air baku bagi rumah tangga, permukiman, pertanian maupun industri juga semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan air baku yang tidak seimbang dengan kemampuan penyediaan diperkirakan akan memicu konflik antar pengguna air. Dengan berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam daya dukung lingkungan dalam menyediakan air. Selain itu, kapasitas infrastruktur penampung air, seperti bendung, embung/longstorage semakin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang belum optimal sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya air, dari waktu ke waktu semakin menurun.
- b. Permasalahan daerah rawan kekeringan di 264 desa di Kabupaten Sumenep menjadi penting untuk ditangani mengingat kejadian bencana kekeringan berdampak kepada ancaman pemiskinan

masyarakat yang terdampak.

Peluang :

- a. Dengan semakin berkurangnya kapasitas dari bangunan-bangunan sumber daya air akibat semakin meningkatnya laju sedimentasi dikarenakan kerusakan lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu, maka sebagai salah satu upaya untuk tetap mempertahankan kapasitas tampungan bangunan waduk dan embung adalah dengan melakukan pengerukan sedimen di bendung maupun embung/longstorage
- b. Meningkatkan tampungan air dengan membangun lebih banyak embung, sumur resapan, menambah ruang terbuka hijau
- c. Pembangunan Aquifer Buatan Simpan Air Hujan (ABSAH) merupakan terobosan memanfaatkan air hujan yang terjadi. Dengan kapasitas tampung 81 m³, ABSAH ini dapat melayani hingga 27 KK selama musim kemarau dengan air hujan yang tertampung selama musim hujan yang diharapkan mampu mengurangi resiko kekeringan di muam kemarau.

3. Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

Tantangan :

- a. Akibat kerusakan lingkungan terutama pada Daerah Tangkapan Air bagian hulu (hutan), aliran permukaan semakin besar dan menimbulkan erosi yang pada akhirnya terjadi sedimentasi di sungai dan saluran, sehingga berdampak mengurangi daya tampung sungai dan saluran yang dapat menyebabkan banjir/genangan baik di areal pemukiman maupun persawahan
- b. Sebagian besar kegiatan masyarakat (permukiman, industri, aktivitas ekonomi, transportasi) berada pada wilayah sempadan sungai yang rawan banjir/longsor
- c. Terdapat bangunan yang dibuat oleh masyarakat diatas sungai yang melanggar sempadan sungai/saluran bahkan mengurangi lebar sungai/saluran
- d. Masih banyak titik-tik pemukiman, fasilitas umum/sosial, lahan pertanian dan pulau-pulau kecil yang belum terlindungi abrasi pantai/perpindahan pasir laut

Peluang :

- a. Memetakan kawasan rawan bencana banjir pada setiap wilayah sungai
- b. Pemeliharaan alur sungai dan saluran yang rawan banjir maupun pada ruas sungai/saluran dengan tingkat sedimentasi tinggi dengan melakukan desain konstruksi untuk meminimalkan sungai
- c. Mencegah dan membebaskan bantaran sungai dari hunian dan bangunan liar serta mengatur pemanfaatan bantaran sungai
- d. Menertibkan penggunaan sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan melalui tahap sosialisasi terlebih dahulu untuk menghindari konflik sosial
- e. Sosialisasi serta pengaturan dan penegakan hukum untuk penertiban kegiatan masyarakat pada wilayah sempadan sungai/saluran maupun ijin pembangunan infrastruktur oleh masyarakat di sempadan sungai/saluran
- f. Mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana banjir
- g. Sebagian besar kegiatan masyarakat (permukiman, industri, aktivitas ekonomi, transportasi) berada pada wilayah sempadan sungai yang rawan banjir
- h. Menyediakan prasarana pengendalian abrasi pantai untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif termasuk merehabilitasi kerusakan prasarana sumber daya air akibat abrasi pantai

4. Aspek Kelembagaan

Tantangan :

- a. Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan semangat reformasi memerlukan beberapa langkah penyesuaian tata pemerintahan, peran masyarakat, dan peran swasta dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Penguatan peran masyarakat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan swasta diperlukan dalam rangka memperluas dan memperkokoh basis sumber daya air
- b. Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antar instansi dan antar daerah otonom telah menimbulkan pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan

Peluang :

- a. Memperkuat koordinasi antar pengelola sumber daya air di setiap level pemerintahan dan kewenangan melalui lembaga koordinasi yang sudah ada seperti TKPSDA, Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021

TABEL T-IV.C.3																	
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN																	
KABUPATEN SUMENEP																	
URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	88.000.000,00	104.130.000	135.369.000	155.674.350	202.376.655	11.266.100	109.127.150	135.972.100	156.068.700	56.509.600	12,80%	104,80%	100,45%	100,25%	27,92%	22.875.331	9.048.700
Pendapatan Asli Daerah	88.000.000,00	104.130.000	135.369.000	155.674.350	202.376.655	11.266.100	109.127.150	135.972.100	156.068.700	56.509.600	12,80%	104,80%	100,45%	100,25%	27,92%	22.875.331	9.048.700
Retribusi Daerah	88.000.000,00	104.130.000	135.369.000	155.674.350	202.376.655	11.266.100	109.127.150	135.972.100	156.068.700	56.509.600	12,80%	104,80%	100,45%	100,25%	27,92%	22.875.331	9.048.700
Retribusi Jasa Daerah	88.000.000,00	104.130.000	135.369.000	155.674.350	202.376.655	11.266.100	109.127.150	135.972.100	156.068.700	56.509.600	12,80%	104,80%	100,45%	100,25%	27,92%	22.875.331	9.048.700
Retribusi Sewa Alat - Alat Berat	77.000.000,00	91.630.000	119.119.000	136.986.850	178.082.905	-	96.550.000	119.300.000	137.200.000	34.950.000	0,00%	105,37%	100,15%	100,16%	19,63%	20.216.581	6.990.000
Retribusi Jasa Pengairan	11.000.000,00	12.500.000	16.250.000	18.687.500	24.293.750	11.266.100	12.577.150	16.672.100	18.868.700	21.559.600	102,42%	100,62%	102,60%	100,97%	88,75%	2.658.750	2.058.700
BELANJA DAERAH																	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.080.128.548,00	5.059.171.617	5.365.605.563	5.551.476.263	6.081.122.757	4.612.239.047	4.959.230.911	5.130.753.646	5.515.845.370	6.029.535.320	90,79%	98,02%	95,62%	99,36%	99,15%	200.198.842	283.459.255
Belanja Pegawai	5.080.128.548,00	5.059.171.617	5.365.605.563	5.551.476.263	6.081.122.757	4.612.239.047	4.959.230.911	5.130.753.646	5.515.845.370	6.029.535.320	90,79%	98,02%	95,62%	99,36%	99,15%	200.198.842	283.459.255
BELANJA LANGSUNG	20.737.368.248,00	23.199.128.575,00	31.974.340.841	30.792.031.259	42.365.298.536	19.892.207.319,50	22.459.868.670,00	22.317.234.153	30.176.235.299	41.047.507.477	95,92%	96,81%	69,80%	98,00%	96,89%	4.325.586.058	4.231.060.031
Belanja Pegawai	5.207.626.548,00	290.348.000,00	272.471.000	279.746.000	281.256.000	4.718.937.047,00	257.893.000,00	245.641.000	247.946.000	266.026.000	90,62%	88,82%	90,15%	88,63%	94,59%	(985.274.110)	(890.582.209)
Belanja Barang dan Jasa	3.486.099.700,00	4.624.161.525,00	5.153.305.375	5.430.664.342	4.986.031.524	3.355.161.867,00	4.355.047.776,00	4.876.160.903	5.250.136.049	4.657.377.727	96,24%	94,18%	94,62%	96,68%	93,41%	299.986.365	260.443.172
Belanja Modal	12.043.642.000,00	18.284.619.050,00	17.770.930.775	25.081.620.917	37.098.011.012	11.818.108.405,50	17.846.927.894,00	17.195.432.250	24.678.153.250	36.124.103.750	98,13%	97,61%	96,76%	98,39%	97,37%	5.010.873.802	4.861.199.069
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SUMENEP

Berdasarkan identifikasi permasalahan menurut tugas dan fungsi pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, dapat diklasifikasikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi setiap aspek kajian.

1. Aspek kajian "**Ketersediaan dan Pemanfaatan Air**" terdapat permasalahan sebagai berikut :
 - Ketidakeimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan.
 - Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air.
 - Menurunnya kemampuan penyediaan air.
 - Pengrusakan ekosistem sungai dan saluran.
2. Aspek kajian "**Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air**" terdapat permasalahan sebagai berikut :
 - Alih fungsi lahan pertanian.
 - Bencana banjir dan kerusakan prasarana yang ditimbulkan.
 - Abrasi pantai dan kerusakan prasarana yang ditimbulkan.
 - Berkurangnya sempadan sungai dan saluran.
3. Aspek kajian "**Sumber Daya Manusia**" terdapat permasalahan sebagai berikut :
 - Lemahnya koordinasi dan kelembagaan.
 - Meningkatnya potensi konflik air di masyarakat.

Secara lengkap, hasil analisis terhadap dokumen KLHS dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada **Tabel T.IV-C.8** dan **Tabel T.IV-C.9** Lampiran Renstra ini.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Jawa Timur.

RPJMD tersebut memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, program kewilayahan dan disertai dengan rencana rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Adapun Visi Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep periode 2016-2021 adalah "**SUPER MANTAP**" yang berarti "Sumenep Semakin Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil & Profesional". Sedangkan Misi Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep periode 2016-2021 adalah :

- 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.** Sumber Daya Manusia merupakan subjek utama dalam pembangunan sehingga Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Sumenep akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan di Internasional. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pendidikan dapat dilihat dari peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
- 2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.**

Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur merupakan penunjang utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep. Adanya peningkatan infrastruktur dapat mendukung kemajuan di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seluruh aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dengan adanya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan diantara keduanya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Peningkatan infrastruktur tersebut juga harus berwawasan lingkungan dengan didukung oleh pengelolaan Sumber Daya Alam secara tepat. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi

- 3. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.** Kemandirian ekonomi merupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh masyarakat Sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Kemandirian tersebut tentunya dengan tidak meninggalkan kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan. Beragamnya potensi ekonomi Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan berdaya saing tinggi menjadi modal dasar dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumenep yang mandiri. Peningkatan kemandirian perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausahamuda, peningkatan daya tarik investasi, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sektor pertanian, industri dan perdagangan.
- 4. Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Accountable.** Tata Pemerintahan yang baik (good governance) adalah tata pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalisme dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh stakeholder baik dari aparaturn pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggungjawab. Setiap aparaturn pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Di samping itu, Pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel. Keberhasilan Pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kinerja birokrasi.

5. **Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.** Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Sumenep yang ditandai oleh tidak adanya tindakan kriminalitas, terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif dan terlaksananya kebebasan demokrasi yang bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga dapat menciptakan stabilitas sosial sehingga kelangsungan hidup yang aman dan damai dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mencukupi ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (LinMas), dan menyelesaikan serta mengurangi konflik sosial yang terjadi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. **Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.** Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang kaya kebudayaan dan nilai-nilai agamis. Hal itulah yang menjadikan Kabupaten Sumenep memiliki banyak adat istiadat dan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan budaya lokal merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan baik lokal dan manca negara. Di samping itu, masyarakat Sumenep juga hidup berdampingan dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Sikap toleransi antar umat beragama yang senantiasa terjaga

dalam kehidupan bermasyarakat harus terus dikembangkan agar semangat persatuan dan kesatuan menjadi pilar penyangga yang kokoh menuju Kabupaten Sumenep yang maju dan sejahtera. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa juga memiliki peran dan fungsi strategis dalam akselerasi pembangunan dengan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda harus terus dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan potensi kepeloporan pemuda dan olahraga.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep periode 2016-2021, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep bertekad melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep periode 2016-2021 khususnya pada point 2.

Pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021, ada beberapa aspek kajian serta kondisi saat ini serta faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam pencapaian visi dan misi Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep. Adapun aspek kajian yang mempengaruhi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Ketersediaan pemanfaatan air baku dan irigasi** masih belum optimal, hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan, meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, menurunnya kemampuan penyediaan air dan pengrusakan ekosistem sungai dan saluran.

Untuk lebih mengoptimalkan tingkat pemanfaatan air baku dan irigasi maka dibutuhkan ketersediaan dana yang cukup secara signifikan, kebijakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, penentuan prioritas program dan kegiatan yang tepat dan didukung oleh penyediaan data sumber daya air yang akurat.

2. **Sarana dan prasarana sumber daya air** masih belum memadai yang perlu dibangun serta diperbaiki, hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian, kejadian bencana banjir dan kerusakan prasarana yang ditimbulkan serta abrasi pantai dan berkurangnya sempadan sungai dan saluran.

Untuk membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana sumber daya air yang optimal maka dibutuhkan ketersediaan dana yang cukup secara signifikan, kebijakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, penentuan prioritas program dan kegiatan yang tepat dan didukung oleh penyediaan data sumber daya air yang akurat

3. **Sumber daya manusia** yang kurang memadai yang ditandai dengan kurang optimalnya wadah koordinasi yang ada untuk memfasilitasi tata kelola sumber daya air. Hal ini disebabkan lemahnya koordinasi dan kelembagaan dan meningkatnya potensi konflik air di masyarakat.

Untuk mengoptimalkan kinerja wadah koordinasi yang ada maka dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan didukung oleh penyediaan sarana prasarana kantor yang memadai.

Analisis mengenai faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi serta program Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep dapat dilihat pada **Tabel T.IV-C.11** Lampiran Renstra ini.

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

A. Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat

Sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode 2015-2019 meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. **Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :**
 - a. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
 - b. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
 - c. Meningkatkan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
2. **Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :**
 - a. **Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi**
 - b. **Meningkatnya ketahanan air**

3. Tujuan 3 : Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :
 - a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
 - b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional
4. Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis :
 - a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
 - b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
 - c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
5. Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :
 - a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
 - b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
 - c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
 - d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
 - e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

Analisis sasaran strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep terhadap sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat periode 2015-2019, bahwa terdapat kecocokan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep yakni Tujuan dan Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat pada point 2 (dua) yaitu **“Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi dan meningkatnya ketahanan air”**.

Komparasi capaian sasaran Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep terhadap sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum termasuk permasalahan yang ada dapat dilihat selengkapnya pada **Tabel T.IV-C.5, Tabel T.IV-C.12** dan **Tabel T.IV-C.14** Lampiran Renstra ini.

B. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam periode 2014-2019 meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fungsi resapan air di bagian hulu 900 Daerah Tangkapan Air.
- b. Mempertahankan ketersediaan air baku irigasi untuk layanan jaringan irigasi dengan luas tanam 2.055.362 ha
- c. Menyediakan air baku domestik di desa rawan kering sebesar 1.750.000 m³
- d. Meningkatkan layanan air baku irigasi waduk sebesar 579.560.000 m³
- e. Menurunkan elevasi banjir, luasan banjir dan lama banjir di daerah rawan bencana seluas 6.000 ha.

Analisis permasalahan pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep terhadap sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019, didapatkan bahwa secara umum sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep telah sejalan dengan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

Disamping itu, dalam rangka mendukung masing-masing sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep terhadap sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur maupun sebaliknya, maka harus selalu saling berkoordinasi antar masing-masing SKPD.

Terdapat 1 (satu) Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yakni DI Jepun dengan luas areal 1.424 Ha sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan

pemenuhan kebutuhan irigasi harus terus berkoordinasi dan pembuatan MoU tentang pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi.

Komparasi capaian sasaran Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep terhadap sasaran Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur termasuk permasalahan yang ada dapat dilihat selengkapnya pada **Tabel T.IV-C.12** dan **Tabel T.IV-C.14** Lampiran Renstra ini.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW

3.5 FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDORONG

1. Faktor Penghambat :

- Keterbatasan dana
- Keterbatasan ketersediaan air
- Database sumber daya air belum lengkap
- Stakeholder / masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan
- Kerusakan DAS
- Terjadinya konflik air

2. Faktor Pendorong :

- SDM Pengairan yang berkualitas yang memadai
- Adanya revisi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi saat ini
- Peningkatan PAD
- Tersedianya potensi untuk membangun embung atau waduk
- Organisasi petani mapan

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sumenep kian memprihatinkan dan mengancam kelangsungan swasembada beras di Kabupaten Sumenep utamanya pada daerah perkotaan. Sejumlah Kecamatan sebagai lahan produktif pertanian misalnya Kecamatan Kota Sumenep saat ini sebagian telah berubah fungsi menjadi pemukiman.

Dari data tahun 2000, luas Daerah Irigasi Kebonagung di Kecamatan Kota seluas 783 hektare. Namun luas lahan tersebut kini mengalami penyusutan drastis. Data hasil Review Desain Daerah Irigasi Kebonagung pada tahun 2010, areal persawahan telah berkurang menjadi 707 Hektare yang berarti telah terjadi pengurangan areal irigasi produktif seluas 76 hektare selama kurun waktu 10 tahun.

2. Ketidakseimbangan Antara Ketersediaan Air dan Kebutuhan

Secara alamiah Kabupaten Sumenep menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan air, karena distribusi yang tidak merata baik secara spasial maupun waktu, sehingga air yang dapat disediakan tidak selalu sesuai kebutuhan baik dalam perspektif jumlah maupun mutu. Dari segi spasial, wilayah Kabupaten Sumenep yang dihuni sekitar 1.079.322 juta jiwa (Sumenep dalam angka, 2010) hanya mempunyai potensi air tawar yang relatif sedikit. Dari segi distribusi waktu, 70% air tersedia pada musim hujan yang berdurasi lima bulan, sedangkan 30% sisanya tersedia pada musim kemarau dengan durasi tujuh bulan.

Ketersediaan air yang melimpah pada musim hujan, selain memberi manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir dan tanah longsor. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya, berupa kekeringan yang berkepanjangan.

3. Bencana Banjir, Erosi Sungai serta Kerusakan Prasarana Yang Ditimbulkan

Bencana banjir yang terjadi hampir setiap tahun di sebagian wilayah Kabupaten Sumenep khususnya pada musim penghujan, mengakibatkan kerusakan pada prasarana sumber daya air. Banjir dan endapan lumpur juga merusak jaringan irigasi pada daerah-daerah bencana. Erosi sungai, endapan lumpur dan sampah pada sungai juga mengganggu dan menurunkan kapasitas sungai. Beberapa kejadian bencana banjir di Kabupaten Sumenep yaitu banjir dan jebolnya tanggul di Desa Sindir Kec. Lenteng dan Desa Muangan Kec. Saronggi akibat tingginya curah hujan dan aliran balik pasang air laut di Kali Saroka dan Kali Anjuk.

4. Abrasi Pantai serta Kerusakan Prasarana Yang Ditimbulkan

Dengan panjang pantai sekitar \pm 900 km dan rata-rata kondisi bibir pantai berpasir menyebabkan banyak titik-titik yang rawan terhadap

abrasi pantai akibat ombak. Pada beberapa wilayah, di sepanjang garis pantai terdapat sarana pemukiman dan jalan sehingga menyebabkan terjadinya banyak kerusakan sarana pemukiman dan jalan tersebut.

5. Meningkatnya Ancaman terhadap Keberlanjutan Daya Dukung Sumber Daya Air

Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air. Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis telah mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak air yang semakin serius.

Selain itu, kelangkaan air yang terjadi cenderung mendorong pola penggunaan sumber air yang tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah, intrusi air laut, dan penurunan permukaan tanah. Kerusakan air tanah sangat sulit dipulihkan, sehingga apabila hal tersebut terjadi terus-menerus secara pasti akan berujung pada terjadinya bencana lingkungan yang berimplikasi luas.

6. Menurunnya Kemampuan Penyediaan Air

Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air, seperti bendung, embung dan long-storage makin menurun, sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya air menurun semakin tajam.

7. Berkurangnya Sempadan Sungai/Saluran

Sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan dan saluran irigasi/drainase, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan saluran. Perlindungan terhadap sempadan dilakukan untuk melindungi dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai

dan saluran kondisi bibir dan dasar sungai/saluran serta mengamankan aliran sungai dan saluran.

Saat ini di Kabupaten Sumenep terdapat beberapa lokasi sempadan sungai yang hilang/rusak. Sebagai contoh adalah hilangnya sebagian fungsi sempadan sungai marengan akibat dari pembangunan pemukiman penduduk yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Selain itu, faktor kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan Peraturan Daerah mengakibatkan banyak terjadi perubahan alih fungsi sempadan sungai/saluran menjadi lahan pemukiman.

8. Pengrusakan ekosistem sungai dan saluran

Kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan Peraturan Daerah menyebabkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya adalah sungai dan saluran berubah fungsi menjadi tempat beraktivitas masyarakat sehari-hari, membangun bangunan di daerah sempadan sungai dan saluran, membuang sampah di sungai dan saluran, merendam kayu di dalam saluran sehingga menghambat aliran air, dan lain-lain. Hal tersebut sangat mengganggu ekosistem dan memperburuk tingkat kualitas air, karena mayoritas peruntukan sungai dan saluran adalah untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi petani yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas tanaman yang dihasilkan pada lahan pertanian.

9. Lemahnya Koordinasi dan Kelembagaan.

Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan semangat reformasi memerlukan beberapa langkah penyesuaian tata pemerintahan, peran masyarakat, peran BUMN/BUMD, dan peran swasta/pelaku usaha dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air.

Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antar-instansi telah menimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan.

10. Meningkatnya Potensi Konflik Air di Masyarakat

Sejalan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan

masyarakat, jumlah kebutuhan air baku bagi rumah tangga, permukiman, pertanian maupun industri juga semakin meningkat. Kebutuhan air yang makin meningkat pada satu sisi, dan ketersediaan yang makin terbatas pada sisi lain, secara pasti akan memperparah tingkat kelangkaan air. Semakin parahnya kelangkaan berpeluang memicu terjadinya berbagai bentuk konflik air, baik antar kelompok pengguna, maupun antar wilayah. Konflik air yang tidak terkendali berpotensi berkembang menjadi konflik dengan dimensi yang lebih luas.

TABEL T-IV.C.12
PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN SUMENEP
BERDASARKAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD DINAS PU. PENGAIRAN KABUPATEN SUMENEP	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.	Alih fungsi lahan pertanian Berkurangnya sempadan sungai dan saluran	Keterbatasan dana Keterbatasan ketersediaan air	Adanya revisi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi saat ini SDM Pengairan yang berkualitas yang memadai Peningkatan PAD
2	Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDG's 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.	Ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air Menurunnya kemampuan penyediaan air	Database sumber daya air belum lengkap Stakeholder / masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan	Tersedianya potensi untuk membangun embung atau waduk Organisasi petani mapan
3	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.	Bencana banjir serta kerusakan prasarana yang ditimbulkan Abrasi pantai serta kerusakan prasarana yang ditimbulkan Pengrusakan ekosistem sungai dan saluran	Kerusakan DAS Terjadinya konflik air	
4	Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.			
5	Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan.			
6	Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.	Lemahnya koordinasi dan kelembagaan Meningkatnya potensi konflik air di masyarakat		

TABEL T-IV.C.14

**PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN SUMENEP
BERDASARKAN SASARAN RENSTRA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD DINAS PU. PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD DINAS PU. PENGAIRAN KABUPATEN SUMENEP	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Terlayannya kebutuhan air untuk irigasi	Alih fungsi lahan pertanian	Keterbatasan dana	Adanya revisi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi saat ini
2	Tersedianya air baku untuk berbagai keperluan dan berkurangnya daerah kekeringan	Menurunnya kemampuan penyediaan air	Keterbatasan ketersediaan air	SDM Pengairan yang berkualitas yang memadai
3	Terlayannya masyarakat terhadap penggunaan air baku untuk kegiatan domestik dan industri	Ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan	Database sumber daya air belum lengkap	Peningkatan PAD
4	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya air	Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air	Stakeholder / masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan	Tersedianya potensi untuk membangun embung atau waduk
5	Berkurangnya daerah genangan banjir untuk debit periode ulang tertentu	Bencana banjir serta kerusakan prasarana yang ditimbulkan	Kerusakan DAS	Organisasi petani mapan
		Pengrusakan ekosistem sungai dan saluran		
6	Terselenggaranya sistem koordinasi tata pengaturan air dan penanganan banjir secara optimal	Berkurangnya sempadan sungai dan saluran	Terjadinya konflik air	
		Lemahnya koordinasi dan kelembagaan		
		Meningkatnya potensi konflik air di masyarakat		
7	Tersedianya data dasar perencanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air			

.BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SUMENEP

Visi adalah gambaran atau pandangan masa depan atau cita-cita yang ingin dicapai. Visi ditetapkan atas dasar pemahaman bersama, merupakan suatu gambaran prospek masa depan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam perumusannya, Visi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep adalah :

“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu Dan Berwawasan Lingkungan Untuk Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat”

Misi adalah pernyataan komprehensif tentang hal-hal yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air
2. Meningkatkan konservasi sumber daya air
3. Mengendalikan dan mengurangi dampak negatif daya rusak air
4. Memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air
5. Membangun sistem informasi sumber daya air secara terpadu
6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang profesional

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas PU. Sumber Daya Air Kab maka diperoleh tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Keberhasilan perumusan tujuan sangat dipengaruhi beberapa Kriteria diantaranya, akseptabilitas, fleksibilitas, dapat diukur, motivator, kesesuaian dengan rumusan visi dan misi organisasi dan mudah dipahami.

Tujuan yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi dan air baku untuk mendukung perekonomian masyarakat

2. Meningkatnya kelestarian dan fungsi sumber daya air
3. Meningkatnya penanggulangan dan pengendalian banjir akibat erosi serta abrasi pantai
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air
5. Menyediakan, memperbaiki dan mengembangkan data untuk pengembangan sumber daya air.
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor

4.2 SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SUMENEP

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran yang efektif memiliki kriteria SMART (*Specific, Measureble, Aggresive but Attainable, Result-oriented, Time Bound*) yang artinya :

- *Spesific* dimaksudkan bahwa sasaran harus menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan, memberikan arah dan tolok ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk menyusun strategi dan kegiatan yang juga spesifik.
- *Measurable* dimaksudkan bahwa sasaran harus terukur dan dapat dipergunakan untk memastikan apa yang akan dicapai dan kapan.
- *Aggresive but Attainable* maksudnya bahwa sasaran harus menantang namun tidak boleh mengandung target yang tidak layak.
- *Result-Oriented* artinya bahwa sasaran harus berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.
- *Time Bound* adalah sasaran harus dapat dicapai dalam waktu yang relatif pendek yang biasanya kurang dari setahun.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep adalah :

1. Terlayaninya kebutuhan irigasi dan air baku serta berkurangnya daerah kekeringan
2. Terpeliharanya kelestarian dan fungsi sumber daya air
3. Berkurangnya daerah genangan banjir
4. Berkurangnya tebing sungai yang rawan erosi/longsor
5. Bertambahnya panjang pantai yang aman dari abrasi
6. Bertambahnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya air

7. Tersedianya data untuk perencanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air
8. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia
9. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai

Adapun Sasaran tersebut diimplementasikan dengan cara sebagai berikut :

- i. Meningkatkan rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik di wilayah daratan dan kepulauan sehingga dapat pula meningkatkan rasio kecukupan irigasi (Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik) di wilayah daratan dan kepulauan
- ii. Meningkatkan sawah irigasi non teknis menjadi sawah teknis dengan cara membangun saluran dan bangunan pelengkap di sumber baru yang memiliki potensi untuk dikembangkan, membangun embung baru agar luas daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis bertambah di wilayah daratan dan kepulauan
- iii. Peningkatan dan optimalisasi penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan jalan membangun Embung baru, Aquifer Buatan Simpan Air Hujan (ABSAH) serta pemanfaatan air bawah tanah yang tetap berlandaskan konservasi
- iv. Melindunginya sumber air di sumber yang rawan akan keursakan
- v. Memperkecil potensi luas wilayah banjir serta kerusakan tebing sungai akibat erosi dengan membangun bangunan pelindung di tebing sungai
- vi. Membangun bangunan pengaman pantai untuk melindungi pantai yang rawan akan abrasi
- vii. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya air dengan cara sosialisasi
- viii. Menyediakan data tentang sumber daya air yang akurat dan terkini untuk kepentingan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
- ix. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur negara agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dengan jalan mengikuti berbagai pelatihan
- x. Selalu menyediakan sarana dan prasarana kantor tersedia dengan baik untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan

.BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SUMENEP

5.1 STRATEGI

Strategi adalah suatu usaha untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi juga memperhatikan bagaimana organisasi meningkatkan kinerjanya, dan bagaimana mencapai misinya.

Strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep adalah :

1. Peningkatan upaya penyediaan dan efisiensi penggunaan sumber daya air
2. Peningkatan upaya pengembangan sumber daya air
3. Meningkatkan upaya perlindungan sumber air dan daerah tangkapan air
4. Memelihara keberadaan sawah irigasi serta peningkatan upaya pengaturan daerah sempadan sumber air, sungai dan saluran
5. Penentuan lokasi-lokasi daerah rawan bencana banjir
6. Penentuan lokasi-lokasi daerah rawan erosi/longsor
7. Penentuan lokasi-lokasi daerah rawan abrasi pantai
8. eningkatan koordinasi masyarakat, swasta/pelaku usaha dan pemerintah dalam rangka pengelolaan sumber daya air
9. Pengelolaan dan manajemen data sumber daya air
10. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
11. Peningkatan sarana dan prasarana kantor

5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dan pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudannya.

Kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep adalah :

8. Mengelola dan mendayagunakan sumber daya air untuk meningkatkan pelayanan irigasi dan air baku
 9. Mengembangkan potensi sumber daya air untuk meningkatkan pelayanan irigasi dan air baku
 10. Memelihara keberadaan sumber air beserta daerah tangkapan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya
 11. Meningkatkan pelestarian waduk, bendungan, dan embung, serta prasarana lainnya serta pengamanan daerah aliran sungai
 12. Mengendalikan kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan
 13. Peningkatan upaya pencegahan, upaya penanggulangan dan upaya pemulihan akibat genangan banjir
 14. Peningkatan upaya pencegahan, upaya penanggulangan dan upaya pemulihan akibat erosi/longsor
 15. Peningkatan upaya pencegahan, upaya penanggulangan dan upaya pemulihan akibat abrasi pantai terutama pada pusat kegiatan ekonomi, jalan, fasilitas umum/sosial, pulau-pulau kecil, serta lahan pertanian
 16. Menata kelembagaan pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing pemangku kepentingan
 17. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang sumber daya air
 18. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola sistem informasi sumber daya air
 19. Pengembangan sistem informasi sumber daya air yang akurat
 20. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditekankan pada tupoksi masing-masing personil melalui pendidikan dan pelatihan
- Pembaharuan sarana dan prasarana kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep dapat dilihat selengkapnya pada **Tabel T.IV-C.24** dan **Tabel T.IV-C.27** Lampiran Renstra ini.

TABEL T-IV.C.24
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SUMENEP

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	20
					6
1	3		4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Irigasi, berkurangnya daerah rawan banjir dan Abrasi Pantai	Indeks kinerja irigasi	<p>Meningkatnya sarana dan layanan irigasi</p> <p>Tersedianya air baku dan Penurunan dampak negatif daya rusak air</p>	<p>Rata-rata debit air dimusim tanam (dua Musim)</p> <p>Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik</p> <p>persentase penambahan luas daerah irigasi</p> <p>Rasio pemenuhan ketersediaan air baku</p> <p>Persentase penurunan dampak negatif daya rusak air</p> <p>Prosentase Penurunan Luas daerah genangan banjir</p>	-

TABEL T-IV.C.27

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERPADU DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI KEADILAN

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI			
MISI I : Meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air						
I.1	Terpenuhinya kebutuhan air irigasi dan air baku untuk mendukung perekonomian masyarakat	I.1.1	Terlayannya kebutuhan irigasi dan air baku serta berkurangnya daerah kekeringan	I.1.1.1	Peningkatan upaya penyediaan dan efisiensi penggunaan sumber daya air	I.1.1.1
				I.1.1.2	Peningkatan upaya pengembangan sumber daya air	I.1.1.2
MISI II : Meningkatkan konservasi sumber daya air						
II.1	Meningkatnya kelestarian dan fungsi sumber daya air	II.1.1	Terpeliharanya kelestarian dan fungsi sumber daya air	II.1.1.1	Meningkatkan upaya perlindungan sumber air dan daerah tangkapan air	II.1.1.1
				II.1.1.2	Memelihara keberadaan sawah irigasi serta peningkatan upaya pengaturan daerah sempadan sumber air, sungai dan saluran	II.1.1.2
MISI III : Mengendalikan dan mengurangi dampak negatif daya rusak air						
III.1	Meningkatnya penanggulangan dan pengendalian banjir akibat erosi serta abrasi pantai	III.1.1	Berkurangnya daerah genangan banjir	III.1.1.1	Penentuan lokasi-lokasi daerah rawan bencana banjir	III.1.1.1
		III.1.2	Berkurangnya tebing sungai yang rawan erosi/longsor	III.1.2.1	Penentuan lokasi-lokasi daerah rawan erosi/longsor	III.1.2.1
		III.1.3	Bertambahnya panjang pantai yang aman dari abrasi	III.1.3.1	Penentuan lokasi-lokasi daerah rawan abrasi pantai	III.1.3.1
MISI IV : Memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air						
IV.1	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air	IV.1.1	Bertambahnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya air	IV.1.1.1	Peningkatan koordinasi masyarakat, swasta/pelaku usaha dan pemerintah dalam rangka pengelolaan sumber daya air	IV.1.1.1
MISI V : Membangun sistem informasi sumber daya air yang terpadu						
V.1	Menyediakan, memperbarui dan mengembangkan data untuk pengembangan sumber daya air.	V.1.1	Tersedianya data untuk perencanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air	V.1.1.1	Pengelolaan dan manajemen data sumber daya air	V.1.1.1
MISI VI : Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang profesional						
VI.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	VI.1.1	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia	VI.1.1.1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	VI.1.1.1
VI.2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor	VI.2.1	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	VI.2.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana kantor	VI.2.1.1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program

Program adalah merupakan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Keberhasilan program erat kaitannya dengan kebijakan yang diambil dan harus sejalan dengan program yang telah ditetapkan Pemerintah. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”, maka untuk tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep memiliki rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Pelayanan komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Operasional UPTD
- Pameran Pembangunan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Konsolidasi dan koordinasi peningkatan kinerja
- Monitoring dan evaluasi kinerja UPT
- 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
 - Penyusunan Laporan Barang Semesteran
- 6. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat
- 7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**
 - Rehabilitasi Jaringan irigasi Utama
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan yang telah di bangun
 - Pembangunan, Peningkatan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kecil/Pedesaan
 - Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kecil/Pedesaan
 - Dana Pendamping Water Resource And Irrigation Sector Management Program
 - Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
 - Water Resource And Irrigation Sector Management Program
 - Survey Kelayakan Penanganan Bangunan Pengairan
 - Operasi dan Pemeliharaan Pintu Air
 - Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
- 8. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku**
 - Persiapan Prasarana Untuk Bangunan Air
 - Pemeliharaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - Pembangunan Embung & Bangunan Penampung Air Lainnya
 - Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Pengairan
- 9. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya**
 - Perlindungan Dan Konservasi Sumber Air
- 10. Program Pengendalian Banjir**
 - Rehab. / pemeliharaan dan perkuatan tanggul / tebing sungai dan normalisasi sal. Pembuang
 - Peningkatan pembersihan sungai dan saluran pembuang
- 11. Program Perlindungan Dan Pemanfaatan Infrastruktur Pengairan**
 - Sertifikasi tanah aset daerah
 - Inventarisasi dan pematokan sarana bangunan pengairan

- Pemanfaatan dan operasional infrastruktur pengairan

12. Program Penanganan Kerusakan Infrastruktur Tak Terduga

- Penanganan Kerusakan Bangunan Air Tak Terduga

13. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Data Hidrologi

- Pembangunan , rehab. Dan pemeliharaan stasiun / penakan curah hujan (swakelola)

14. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air

- Inventarisasi Infrastruktur Bangunan Pengairan

15. Program Pengendalian Abrasi Pantai

- Pembangunan/Perbaikan Penahan Gelombang

**SASARAN STRATEGIS SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
KAB. SUMENEP TAHUN 2016 - 2021**

No	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	PEMENUHAN KEBUTUHAN IRIGASI DAN AIR BAKU :		
a	Berkurangnya luas layanan sawah beririgasi	1. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan / Pergantian Pintu Air - Operasi dan Pemeliharaan Pintu Air - Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi - Rehabilitasi Jaringan Irigasi - Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun - Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kecil/Pedesaan - Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kecil/Pedesaan - Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan Infrastruktur Pengairan - Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah - Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
b	Ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan	1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan Prasarana Untuk Bangunan Air - Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya - Pengeboran Air Tanah/Bawah Tanah

			- Pemeliharaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
		2. Pengembangan Dan Pengelolaan Data Hidrologi	- Pembangunan dan Pemeliharaan Stasiun/Penakar Curah Hujan
c	Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air	1. Program Perlindungan dan Pemanfaatan Infrastruktur Pengairan	- Sertifikasi Tanah Aset Daerah
			- Inventarisasi Dan Pematokan Sarana Bangunan Pengairan
			- Pemanfaatan dan Operasional Infrastruktur Pengairan
		2. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya	- Perlindungan Dan Konservasi Sumber Air
		3. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air	- Inventarisasi Infrastruktur Bangunan Pengairan
2	DAYA RUSAK AIR		
a	Banyaknya kerusakan lingkungan akibat daya rusak air	1. Program Pengendalian Abrasi Pantai	- Pembangunan/Perbaikan Penahan Gelombang
		2. Program Pengendalian Banjir	- Pemeliharaan Sungai/Saluran Pembuang
			- Pembangunan, Perkuatan dan Rehabilitasi Tebing dan Tanggul Sungai/Saluran Pembuang
		3. Program Pengembalian Fungsi Infrastruktur Pengairan	- Penanganan Kerusakan Infrastruktur Yang Tak Terduga
		4. Program Pengelolaan Peralatan Pendukung Infrastruktur Pengairan	- Pengadaan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Alat Berat

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat selengkapnya pada **Tabel T.IV-C.28** Lampiran Renstra ini .

TABEL T-IV.C.28
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SUMENEP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				1	2	3	4				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Irigasi, berkurangnya daerah rawan banjir dan Abrasi Pantai	Indeks kinerja Irigasi	Meningkatnya sarana dan layanan irigasi							70,01%	73,76%	51.514.866.758	77,51%	62.145.500.000		
				1	03	02	xx	Program Infrastruktur Keirigasian	Persentase Pemenuhan kebutuhan Irigasi	70,01%	73,76%	27.977.850.000	77,51%	34.196.000.000	
			Rata-rata debit air dimusim tanam (dua Musim)							3.113,00	3.113,00		3.113,00		
				1	03	02	xx	Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi air permukaan dan Air Tanah	Jumlah Areal Irigasi = 10.904 Ha Irigasi Teknis permukaan = 5.332 Ha Irigasi Teknis Air Tanah = 2.201 Ha Irigasi Non Teknis Permukaan = 1.899 Ha Irigasi Non Teknis Air Tanah = 1.472 Ha	Areal Irigasi teknis 5.332 Ha permukaan dan 2.201 Ha air tanah. Areal Irigasi Teknis seluas 5.635 Ha air permukaan dan 2.251 Ha air tanah		5.294.350.000	Areal Irigasi Teknis seluas 5.965 Ha air permukaan dan 2.326 Ha air tanah	6.111.700.000	
			PERSENTASE JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI BAIK							70,01%	73,76%		77,51%		
				1	03	02	xx	Peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi Air Permukaan dan Air Tanah	Jumlah Areal Irigasi = 10.904 Ha Irigasi Teknis permukaan = 5.332 Ha Irigasi Teknis Air Tanah = 2.201 Ha Irigasi Non Teknis Permukaan = 1.899 Ha Irigasi Non Teknis Air Tanah = 1.472 Ha	Areal irigasi Teknis 5.332 Ha permukaan dan 2.201 Ha air tanah Areal Irigasi Teknis 5.635 Ha air permukaan dan 2.251 Ha air tanah		#####	Areal Irigasi Teknis seluas 5.965 Ha air permukaan dan 2.326 Ha air tanah	22.584.300.000	
			PERSENTASI PENAMBAHAN LUASAN DAERAH IRIGASI							0,00%	26,67%		33,33%		
				1	03	02	xx	Pembangunan, Penyediaan Infrastruktur Jaringan Irigasi Air Permukaan dan Air Tanah	Jumlah Areal Irigasi = 10.904 Ha Irigasi Teknis permukaan = 5.332 Ha Irigasi Teknis Air Tanah = 2.201 Ha Irigasi Non Teknis Permukaan = 1.899 Ha Irigasi Non Teknis Air Tanah = 1.472 Ha	Menambah areal irigasi air permukaan dan air tanah 10.904 Ha		Penambahan areal irigasi seluar 10.904 Ha	4.000.000.000	Penambahan areal irigasi seluar 11.084 Ha	5.500.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Ada 5 indikator kinerja utama dan 6 indikator pendukung yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

21. Daerah irigasi yang dapat diairi dengan Irigasi Teknis (wilayah daratan dan kepulauan)
22. Rasio Kecukupan Jaringan irigasi
23. Prosentase genangan/banjir pada wilayah pertanian
24. Prosentase kerusakan tebing sungai akibat erosi
25. Prosentase panjang garis pantai yang terlindungi
26. Peningkatan dan optimalisasi penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat (Embung,ABSAH,Air tanah dalam)
27. Terlindunginya sumber air
28. Rasio peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya air
29. Penyediaan data yang akurat
30. Aparatur negara memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai
31. Sarana dan prasarana kantor tersedia dengan baik

Indikator kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dapat dilihat selengkapnya pada **Tabel T.IV-C.29**.

TABEL T-IV.C.29
INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SUMENEP
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUMENEP

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN K			
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	
1	Rata-rata debit air dimusim tanam (dua Musim)		-	-	-	3.1
2	PERSENTASE JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI BAIK		-	-	-	
3	PERSENTASI PENAMBAHAN LUASAN DAERAH IRIGASI		-	-	-	
4	Rasio pemenuhan ketersediaan air baku		-	-	-	1.81
5	Persentase penurunan dampak negatif daya rusak air :		-	-	-	
6	Persentase penurunan luas daerah genangan banjir		-	-	-	

BAB VII

PENUTUP

Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2021 inii dapat disusun dengan baik. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja serta upaya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air kabupaten Sumenep dalam kurun waktu lima tahun (2011-2021).

Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan apabila perlu akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep di masa lima tahun tersebut dapat lebih terarah dan terukur.

Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air kabupaten Sumenep tahun 2011-2021 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep.

Sumenep,

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR**

KABUPATEN SUMENEP

Ir. ERI SUSANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680225 199403 1 007

